

Dualisme Elite Kerajaan Badung dan Kerajaan Buleleng pada Masa Revolusi di Bali, 1945-1950

PUTU DYAH PRADNYA PARAMITHA

Dosen Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Udayana, Indonesia

Email: pradnya.paramitha@unud.ac.id

Abstract

This study discusses the occurrence of internal conflicts between royal elites in Bali especially the Kingdom of Badung and the Kingdom of Buleleng during the revolution of 1945-1950. In fact, this conflict had been an issue for a long time which was caused by the caste system (known as *wangsa*) and finally culminated with the addition of an atmosphere of revolution. There are three variants of the elite found in this study, including: the royal elite of federalism not republicans, unitary republican royal elite (non-cooperative), and republican federalism (cooperative) royal elites. The study formulates problems including: (1) Why did political differences arise among the royal elites?; (2) What were the motivations for the political choices of the royal elite and what were the consequences?; and (3) What were the implications of conflicts between royal elites? This study utilizes a social history approach where the interpretation aspect is more emphasized. This study reveals that Balinese people, especially Badung and Buleleng, are still influenced by elements of caste and other traditional ties i.e patrimonial and patron-client ties. The kinship ties between the royal elites are also very firm, resulting in the conflict between the royal elites lasted shorter.

Keywords:

royal elite;
federalism;
republicans;
unity; social
conflict; caste
system

Abstrak

Studi ini membahas tentang terjadinya konflik internal antar elite kerajaan di Bali pada masa Revolusi 1945-1950, khususnya di Kerajaan Badung dan Kerajaan Buleleng. Konflik ini ternyata memang sudah mengakar sejak lama yang disebabkan oleh adanya sistem kasta (*wangsa*) dan akhirnya memuncak dengan ditambahnya suasana revolusi. Terdapat tiga varian elite yang ditemukan dalam studi ini, antara lain: elite kerajaan federalisme bukan republikan, elite kerajaan republikan kesatuan (non-kooperatif), dan elite kerajaan republikan federalisme (kooperatif). Adapun rumusan masalah dalam studi ini meliputi: (1) Mengapa terjadi perbedaan pilihan politik antar sesama elite kerajaan?; (2) Apa motivasi pilihan politik dari elite kerajaan serta bagaimana konsekuensinya?; dan (3) Apa implikasi dari konflik antar sesama elite kerajaan? Dalam penelitian ini menggunakan fokus kajian berupa sejarah sosial dimana aspek interpretasi dalam penelitian ini lebih ditekankan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Bali, khususnya Badung dan Buleleng, masih dipengaruhi oleh unsur-unsur kasta dan ikatan tradisional lainnya, seperti ikatan patrimonial dan patron-klien. Ikatan kekerabatan antara elite kerajaan juga sangat kuat, sehingga konflik diantara kalangan elite kerajaan ini tidak berlangsung lama.

Kata Kunci:

elite
kerajaan;
federalisme;
republikan;
kesatuan;
konflik
sosial; sistem
kasta

Pendahuluan

Banyak pembahasan yang dilakukan mengenai revolusi di Bali namun hanya berfokus pada babak perang-gerilya atau juga cenderung hanya menonjolkan elite dalam tingkat parlemen pusat. Dari kajian atau tulisan tersebut ditemukan aspek yang luput dari perhatian yaitu terdapat adanya narasi-narasi tentang konflik internal antar sesama elite kerajaan yang juga merupakan suatu persoalan bagaimana akhirnya Bali yang saat itu merupakan wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) bisa kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bali merupakan pulau yang relatif kecil namun memiliki banyak kerajaan yang tersebar secara geografis dengan istana- istananya yang disebut dengan puri. Puri di mata masyarakat Bali di samping sebagai identitas juga sebagai pusat kekuasaan raja-raja di Bali (Agus Aris Munandar, 2005: 164-194). Dalam studi yang dilakukan yang berhubungan dengan revolusi fisik di Bali, ditemukan dua kerajaan yang paling menonjol dalam dinamika konflik internal yaitu Kerajaan Badung yang di dalamnya terdapat Puri Agung Satria, Puri Pemecutan, dan Puri Kesiman dengan Kerajaan Buleleng yang di dalamnya terdapat Puri Buleleng dan Puri Sukasada.

Leo Howe dalam bukunya *Hinduism and Hierarchy in Bali* (2001) menyebutkan konflik internal kerajaan- kerajaan di Bali sudah terjadi jauh sebelum kemerdekaan. Dalam bukunya juga disebutkan adanya sikap ambigu atau keragu-raguan antar sesama elite dalam mendukung kerajaannya.

Dalam penelitian ini penulis menemukan tiga varian elite yang terdiri dari: (1) elite kerajaan federalisme, bukan republikan sebagai pendukung utama Belanda; (2) elite kerajaan republikan kesatuan (non-kooperatif) yang berjuang untuk mempertahankan proklamasi atas dasar semangat nasionalisme kemerdekaan; dan (3) elite kerajaan republikan federalisme (kooperatif) yang mau bekerja sama dengan Belanda sebagai strategi, tapi pada akhirnya tujuannya adalah kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dualisme dalam konteks studi revolusi fisik di Bali mencerminkan adanya kelompok-kelompok elite yang berseberangan dalam pandangan politik dan strategi perjuangan. Penelitian ini mengungkap bagaimana Kerajaan Badung, dengan entitas-entitas seperti Puri Agung Satria, Puri Pemecutan, dan Puri Kesiman, berperan sebagai pendukung utama Belanda, menciptakan dinamika yang berbeda dengan Kerajaan Buleleng yang diwakili oleh Puri Buleleng dan Puri Sukasada. Dalam suasana konflik internal yang kompleks ini, elite-elite kerajaan berperan penting dalam membentuk arah perjuangan dan aliansi politik, menciptakan suatu pertarungan ideologi antara yang pro-Belanda dan yang mendukung semangat kemerdekaan.

Dengan menganalisis konsep dualisme ini, penulis tidak hanya menyoroti perbedaan strategi di antara elite-elite tersebut, tetapi juga

menggambarkan bagaimana pergeseran dan interaksi antara mereka mempengaruhi jalannya sejarah Bali selama periode revolusi.

Berdasarkan hal tersebut dan pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya penulis mengkaji adanya dualisme yang terjadi antara elite kerajaan secara lebih mendalam pada sebuah penelitian yang berjudul “Dualisme Elite Kerajaan Badung dan Kerajaan Buleleng Pada Masa Revolusi di Bali, 1945-1950”. Dari latar belakang di atas ditemukan suatu rumusan masalah dalam studi ini, yaitu ditemukan adanya konflik atau pergolakan internal antar sesama elite kerajaan yang ingin mempertahankan *status quo* di Kerajaan Badung dan Kerajaan Buleleng.

Masalah tersebut perlu dikaji secara historis dengan mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Mengapa terjadi perbedaan pilihan politik antar sesama elite kerajaan? 2) Apa motivasi pilihan politik dari elite kerajaan serta bagaimana konsekuensinya? 3) Apa implikasi dari konflik antar sesama elite kerajaan?

Penelitian sebelumnya mengenai revolusi di Bali telah dilakukan oleh beberapa sarjana. I Made Sendra dalam “Pergolakan Elite dalam Panggung Politik di Bali 1945-1950” (2013) lebih banyak menekankan kedatangan pasukan Belanda dari pelariannya di Australia. Penelitian I Made Sendra ini mengupas perjuangan putra-putra Bali dalam parlemen Indonesia Timur. Namun, sisi kelemahan kajian tersebut meskipun berjudul pergolakan elite tetapi yang dimaksud adalah elite dalam skala makro yaitu di tingkat parlemen pusat. Oleh karena itu, penulis menggunakan pustaka ini sebagai acuan dalam menulis kajian elite secara mikro yaitu antar sesama elite kerajaan dan juga elite terpelajar di Bali. Kemudian, kajian berikutnya dilakukan oleh Anak Agung Bagus Wirawan (2012) mengambil studi tentang revolusi dalam skala makro yang meliputi seluruh wilayah Sunda Kecil (Bali, NTB, NTT sekarang) sebagai fokus kajian, yaitu buku karya Anak Agung Bagus Wirawan yang berjudul *Pusaran Revolusi Indonesia di Sunda Kecil 1945-1950*. Kajian ini melihat bagaimana respon masyarakat lokal di wilayah Sunda Kecil terhadap revolusi fisik dan kedatangan Belanda. Hal yang menjadikan riset ini berbeda adalah menggambarkan perlawanan dan juga perjuangan para tokoh-tokoh di Sunda Kecil dalam parlemen Negara Indonesia Timur untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, riset ini bersifat makro, tidak membahas secara detail pergolakan- pergolakan elite yang terjadi terutama secara internal di tingkat lokal. Kemudian, Leo Howe dalam *Hinduism and Hierarchy in Bali* (2001) menyebutkan elite kerajaan sejak sebelum kemerdekaan sudah menunjukkan adanya sikap ambigu dan keraguan dalam mendukung kerajaannya, namun tidak jelaskan secara detail apa penyebab keraguan tersebut. Keraguan antar sesama elite kerajaan inilah yang penulis telusuri dalam penelitian ini.

Dapat dinyatakan bahwa tidak ditemukan penelitian yang secara khusus

dan detail dalam skala mikro. Walaupun demikian, pustaka di atas masih bisa penulis gunakan sebagai acuan untuk memahami lebih mendalam soal konflik internal antar sesama elite kerajaan di Bali.

Analisis Teori Konflik dan Sirkulasi Elite dalam Pergolakan Politik

Untuk menjelaskan konflik pergolakan elite di Bali, maka di dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sejarah dan teori ilmu sosial. Pertanyaan mengenai mengapa suatu peristiwa itu terjadi dijawab menggunakan teori yang paling relevan dipakai untuk mencari dan menemukan sumber serta menganalisisnya menjadi cerita sejarah yang utuh yaitu teori konflik dari Antonio Gramsci (Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, 2005: 30-31) dan teori sirkulasi elite dari Vilfredo Pareto (1968: 8) dan Suzanne Keller (1984: ix).

Dalam memahami studi terkait konflik elite, konsep begitu penting untuk membantu memberikan penjelasan secara rinci untuk dapat lebih mudah menganalisis dan dipahami. Dalam studi ini digunakan konsep yaitu patron-klien, elite, dan transformasi struktur sosial.

Hubungan patron-klien menurut Keit R. Legg pada dasarnya adalah hubungan atau tautan antara para pelaku yang menguasai sumber daya yang tidak sama, hubungannya yang bersifat khusus, dan mengandung makna saling menguntungkan (1983: 10-29). Hubungan patron-klien dalam masyarakat Bali begitu kuat. Hal ini disebabkan karena adanya sistem kasta (wangsa). Kasta yang lebih rendah merupakan klien dari kasta di atasnya, demikian juga rakyat terikat dengan patronnya masing-masing. Puri sebagai rumah raja merupakan patron tertinggi dari klien di bawahnya yang mempunyai hubungan yang erat yang disebut dengan clientship.

Konsep yang kedua adalah elite. Dalam pengertian Suzanne Keller, elite adalah sekelompok orang yang memerintah yang disebut dengan the ruling elite atau the ruling class. Pergolakan politik di Bali dipicu oleh perbedaan kepentingan antara sesama elite kerajaan, yaitu para raja dan bawahannya sebagai elite penguasa lama melawan elite kerajaan lainnya yang berkolaborasi dengan elite modern atau elite strategis yang merupakan hasil atau produk dari perubahan sosial.

Konsep yang ketiga adalah transformasi sosial. Pengertian konsep transformasi merujuk pada perubahan sistem sosial baik bentuk, fungsi, maupun sifat ke arah perbaikan sebagai prasyarat perkembangan institusi atau masyarakat. Konsep ini menjelaskan bagaimana adanya perubahan bentuk maupun fungsi struktur sosial masyarakat Bali yang lebih mengarah pada demokratisasi. Hal ini terjadi setelah kemerdekaan 1945.

Antagonisme Elite Kerajaan dan Elite Modern dalam Perjuangan Kemerdekaan

Membicarakan elite dalam sistem politik tradisional atau sistem politik patrimonial sering dimaknai sebagai dualisme antara elite tradisional dan elite modern. Padahal jika berbicara tentang elite tersebut sangat banyak variannya, seperti elite agama, elite ekonomi, elite militer, elite politik, dan yang lainnya. Dalam pembahasan pada babak revolusi kemerdekaan di Bali, khususnya Kerajaan Badung dan Kerajaan Buleleng dibicarakan adanya dualisme yang terjadi antara elite kerajaan.

Siapa yang dimaksud dengan elite kerajaan dan dimana posisi mereka dalam pergolakan politik di Bali? Elite kerajaan adalah elite lama yang terdiri dari raja-raja Bali beserta bangsawan bawahannya seperti punggawa. Punggawa mengepalai wilayah setingkat distrik dan status seorang punggawa cukup tinggi karena sebagai wakil raja di wilayahnya. Para bangsawan lainnya adalah keluarga raja, sama seperti di Jawa yang dikenal dengan istilah kaum priyayi (Kuntowijoyo, 2004: 45-64). Elite tradisional ini menginginkan tetap bekerja sama yang erat dengan pemerintah Belanda. Oleh karena mereka secara tradisional mempunyai kekuasaan dan status sosial yang tinggi sebagai penguasa. Para keluarga raja (priyayi) ditempatkan menyebar bahkan sampai ke desa-desa.

Berbeda dengan elite kerajaan, elite modern atau elite pejuang, meminjam konsep Robert van Niel (1960: 62-72), merupakan golongan terpelajar hasil dari pendidikan yang berorientasi ke masa depan. Secara tidak langsung, ini bisa diumpamakan dengan halnya kebijakan *crypto-colonies* dalam jurnal *The Absent Presence: Discourses of Crypto-Colonialism* (Herzfeld, 2002). Elite ini lahir dari kebijakan pendidikan kolonial (Agus Suwignyo, 2013). Suasana revolusi menyatukan para elite modern yang berasal dari berbagai lapisan, baik dari kalangan guru, militer, atau lapisan pamong praja (Heather Sutherland, 1983: 25). Revolusi menurut Huntington (Eisenstaad, 1986: 5), merupakan suatu usaha yang menghendaki perombakan secara menyeluruh terhadap sistem nilai-nilai, mitos, lembaga politik, struktur sosial, kepemimpinan, aktivitas maupun kebijakan pemerintah. Mitos-mitos tentang zaman lampau yang sejahtera seperti yang dikatakan oleh Kuntowijoyo, yang merupakan mitos politik yang harus disingkirkan (Kuntowijoyo, 2017: 181-196). Mitos-mitos tentang penjajahan dan mitos-mitos tentang Bali yang *ajeg* di bawah pemerintahan Belanda dapat diketahui dari cerita-cerita para tokoh yang masih hidup sampai sekarang. Sehingga penggunaan sumber lisan dalam menjelaskan sejarah masih relevan (Mrazek, 2004).

Perlu pula diketahui bahwa elite kerajaan dalam perjuangannya tidak semua memihak Belanda atau pro-republik. Seperti perjuangan yang dilakukan oleh Ida Anak Agung Gde Agung, seorang yang berasal dari elite kerajaan, tetapi memiliki taktik perjuangan yang kooperatif lewat parlemen.

Para elite modern atau elite pejuang sebaliknya menolak kerja sama dengan Belanda (non-kooperatif), yang memilih melakukan perjuangan secara revolusi bersenjata. Perbedaan antara ketiga varian elite ini didasarkan pada status sosial tradisional mereka, legitimasi kekuasaan, dan taktik atau strategi perjuangan yang diterapkan.

Para pejuang (elite republiken kesatuan) yang merupakan tandingan elite kerajaan (elite federalisme, bukan republiken) mempunyai gagasan-gagasan atau ide-ide baru karena mengenyam pendidikan barat. Selain pendidikan, elite ini juga memiliki link dengan para elite nasional. Oleh karena seperti halnya Soekarno yang merupakan putra Bali. Buleleng merupakan rumah biologis Soekarno, sedangkan Badung (Puri Satria) merupakan rumah ideologis Soekarno.

Elite modern juga disebut dengan kaum intelegensia menurut Robert van Niel. Mereka ini yang membawa ide-ide perubahan dan sebagai elite modern berperan juga sebagai inovator, yang menghendaki terjadinya perubahan masyarakat dan juga perubahan struktur masyarakat. Termasuk pergeseran peran serta fungsi dari lembaga-lembaga lama. Elite kerajaan federal ingin mempertahankan status quo, dan memandang setiap perubahan sebagai ancaman. Dalam masyarakat transisi proses perubahan merupakan situasi konflik antara elite tradisional dan elite modern. Dilihat dari sudut pandang ini, terdapat antagonisme antara kekuatan konservatif yang berusaha mempertahankan diri dan kekuatan baru yang berorientasi ke masa depan dengan semangat pembaharuan dan pandangan yang progresif. Sedangkan, elite modern sebagai komponen perjuangan rakyat Bali yang menentang kembalinya Belanda kemudian membangun sayap organisasi bersamaan dengan perjuangan bersenjata.

Koneksitas Antar Elite Kerajaan di Bali

Sistem kasta yang ada di dalam masyarakat Bali adalah salah satu alasan yang mengikat elite kerajaan di Bali dalam satu keluarga besar, sehingga disebut dengan *wangsa*. Asal-muasal dari sistem ke-*wangsa*-an ini bermula dari ekspansi Majapahit ke Bali pada tahun 1343 (Ketut Ginarsa, 1955: 10). Majapahit membawa kelompok yang menurunkan adanya *Tri Wangsa* yaitu *Brahmana*, *Ksatria*, dan *Weisya*, sedangkan masyarakat Bali asli (yang tidak berkasta) termasuk dalam kelompok *Sudra* – yang sekarang disebut dengan *Jaba*.

Wangsa Brahmana berasal dari dua orang pendeta dari Jawa Timur yaitu Dang Hyang Nirartha dan Dang Hyang Astapaka yang memiliki gelar Ida Bagus dan Ida Ayu. *Wangsa Ksatria* adalah keturunan dari Raja Bali Kresna Kepakisan dan para *Arya* yang menyertai dari Majapahit menurunkan gelar Dewa (Agung) dan Gusti (Agung) untuk laki-laki dan Dewa Ayu dan Gusti Ayu untuk perempuan. Tiga orang patih yang menyertai yaitu Tan Kober,

Tan Kaur, dan Tan Mundur menurunkan *Wangsa Waisya* yang memakai gelar (*tittle name*) Sri atau Sang.

Dengan sistem kasta ini kemudian ini kemudian mengikat mereka dalam perkawinan dalam satu kasta atau antar kasta. Perkawinan antar kerajaan atau antar Puri (Keraton) sudah terjadi sejak zaman Gelgel abad ke-15. Seorang dari kasta tertentu tidak memungkinkan menikah dengan *Sudra* (atau *Jaba*) pada zaman dahulu. Hubungan kekerabatan dalam satu kasta atau wangsa ini ditandai dengan adanya satu tempat persembahyangan (Pura) yaitu Pura *Kawitan* (I Ketut Wiana, 2007: 56-57). Pura *Kawitan* ini mengikat keluarga besar yang disebut dengan clan besar (I Gusti Ngurah Bagus, 1995: 294-296), sedangkan pura yang lebih kecil atau disebut dengan *Merajan Agung* guna mengikat masyarakat yang disebut dengan klan kecil.

Raja-raja Bali kemudian mengakui putra-putranya untuk menduduki jabatan raja, punggawa, atau jabatan-jabatan lokal di daerah-daerah. Panji Sakti yang menurunkan raja-raja Buleleng adalah putra Raja Segening dari Gelgel. Raja Gelgel ini juga menikahi putri Raja Pemecutan di Badung. Raja Mengwi yang merupakan bagian dari Badung juga menurunkan beberapa elite kerajaan di beberapa daerah Badung seperti Kapal, yang juga berasal dari Patih Kerajaan Gelgel Gusti Agung Maruti yang menurunkan para *Arya* di Bali, seperti Mengwi dan Keramas (Nordholt, 2006: 25).

Elite kerajaan Badung, khususnya Puri Pemecutan yang paling cepat berkembang. Hal ini didukung oleh faktor ekonomi atau kemakmuran, dimana Pemecutan mempunyai sawah-sawah yang luas di Badung Barat dan akses Pelabuhan di Kuta. Menurut laporan terakhir, Puri Pemecutan sekarang sudah berkembang pesat menjadi 40 buah Puri yang terikat dalam kerabat Puri Pemecutan (*Harian Nusa Bali*, 2022: 3).

Di Kerajaan Buleleng juga terikat dua puri besar yaitu Puri Sukasada dan Puri Agung Buleleng yang berkembang menjadi puluhan puri yang ditentukan dari *Kawitan* atau *Merajan Agung* yang sama. Jika terjadi perkawinan antar kasta atau wangsa, kekerabatan diambil dari *wangsa* laki-laki karena di Bali dikenal kekerabatan dari garis keturunan laki-laki (patriarki).

Dari uraian di atas sebenarnya dapat diketahui para elite kerajaan baik yang mendukung Republik maupun yang mendukung Belanda pada umumnya mereka berkerabat karena berasal dari keturunan yang sama atau karena perkawinan antar kasta.

Elite Kerajaan Federalisme, Bukan Republikan

Kelompok utama pendukung federalisme adalah para raja dan elite kerajaan lainnya. Ketika terjadi proklamasi 17 Agustus 1945, sebagian besar elite kerajaan dan raja di Bali tidak memahami dengan baik situasi yang terjadi di Jakarta. Oleh karena kelompok atau para elite kerajaan ini sudah menikmati

kedudukan dan status sosial yang tinggi sebagai piramida sosial sejak tahun 1929.

Sejak tahun 1938, delapan raja di Bali diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai *zelf bestuurder* yang menguasai suatu wilayah tertentu. *Zelf bestuurder* ini diangkat dari keturunan raja terdahulu, sehingga sering juga disebut kerajaan (swapraja). Tentu saja hubungan baik antara raja-raja dengan pemerintah Belanda sudah terjadi relatif lama, terutama dengan Kerajaan Badung, dan Kerajaan Buleleng. Namun ketika terjadi revolusi 1945, kebanyakan para raja masih merasa dekat dengan Belanda. Hanya beberapa raja dan elite kerajaan yang tegas mendukung revolusi. Adanya kepentingan kekuasaan yang disebut dengan vested interest (I Gusti Ngurah Bagus, 1987: 3), yang menyebabkan mereka mendukung sepenuhnya federalisme yang diinisiasi oleh Van Mook karena federalisme ini menghendaki hubungan yang tetap terjadi dengan Belanda.

Pendukung utama dari federalisme ini adalah Raja Klungkung – Dewa Oka Geg, Raja Karangasem – Anak Agung Ketut Agung, Raja Bangli – Anak Agung Oka, Raja Gianyar – Anak Agung Gde Agung, Punggawa Ubud yang menjadi tokoh kunci adalah Tjokorda Raka Sukawati, dan Sekretaris Dewan Raja-raja Bali – I Gusti Gde Oka. Kerajaan Badung sejak tahun 1946 yang menjadi tokoh federalis adalah Raja Pemecutan (yang sebelumnya menjadi Punggawa Kota Denpasar) – I Gusti Ngurah Gde Pemecutan (yang nantinya menjadi Cokorda Gde Pemecutan (Tim Sejarah Yayasan Kerta Budaya, 2011: 284) dan Raja Buleleng, Anak Agung Pandji Tisna, sebenarnya tidak termasuk tokoh federalis, tetapi oleh Dewan Raja-raja dikelompokkan menjadi tokoh federalis (I Gusti Ngurah Gord. 2005: 6).

Di Kerajaan Buleleng, tokoh federalisme adalah Anak Agung Pandji Tisna yang merupakan Raja Buleleng. Anak Agung Pandji Tisna adalah putra dari Raja Buleleng sebelumnya yaitu Anak Agung Ketut Djelantik yang memang sangat dekat dengan Belanda yang dilantik tahun 1938 bersama dengan raja-raja Bali lainnya. Raja Buleleng sudah sejak lama tidak baik hubungannya dengan keluarga I Gusti Ketut Pudja yang merupakan putra Punggawa Buleleng Kota. Memang jika dilihat sejarahnya, tidak seketurunan dengan Pandji Sakti karena keluarga Pandji Sakti kemungkinan sudah habis oleh Penguasa Karangasem sejak awal abad ke-19 (Wawancara dengan I Made Pageh, Guru Besar Sejarah UNDIKSHA). Sehingga ketika pengakuan kedaulatan menjadi Republik Indonesia yang menjadi bupati atau swapraja setelah 1950, yang berasal dari keluarga Pandji Tisna ditolak oleh rakyat.

Di Kerajaan Badung, tokoh federalisme justru berasal dari Punggawa Kota yang merupakan Wakil Raja – I Gusti Ngurah Gde Pemecutan sejak 1946. Pada mulanya, I Gusti Ngurah Gde Pemecutan aktif mendirikan sekolah dan menjadi pengurus Taman Siswa sejak tahun 1930. Pada awal revolusi, ia bersimpati pada perjuangan. Namun ketika diangkat menjadi Raja Badung

sejak 1946, ia menjadi tokoh federalis. Pemecutan kemudian juga membentuk Pasukan Pembela Puri yang disebut dengan Nara Sadu di bawah pimpinan elite kerajaan – I Gusti Ngurah Kanta.

Rupanya konflik lama yang terjadi di Kerajaan Badung menyebabkan Puri Pemecutan menjadi pendukung federalisme yang militan. Padahal sebelumnya I Gusti Ngurah Gde Pemecutan menjadi wakil raja dari I Gusti Ngurah Alit. Faktanya tidak semua puri-puri bawahan Pemecutan mengikuti sebagai federalisme, ada yang mengikuti ada yang tidak. Tokoh puri bagian Pemecutan adalah I Gusti Putu Merta yang juga merupakan tokoh PNI, tetap tidak mau mengikuti Pemecutan sebagai pendukung federalisme dan tetap mendukung negara kesatuan.

Elite Kerajaan Republikan Kesatuan (Non-Kooperatif)

Para elite kerajaan Kesatuan (Republiken) tidak banyak tahu tentang konsep dan teori tentang unitaris (Negara Kesatuan), dimana kelebihan dan kekurangannya dibandingkan Federalisme. Bagi mereka Negara Kesatuan identik dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, identik dengan Soekarno-Hatta, dan identik dengan Soekarno-Hatta adalah simbol persatuan Indonesia. Ketika Van Mook pada awal-awal kedatangannya hanya mau berunding dengan Sjahrir tanpa menyertakan Soekarno, perundingan mengalami kegagalan. Begitu juga ketika Soekarno-Hatta ditahan di Bangka pasca Agresi Militer Belanda II, keinginan Van Mook membentuk federasi tanpa Republik, juga mengalami kegagalan. Apa artinya Republik tanpa Soekarno-Hatta dan apa artinya perjuangan proklamasi tanpa Soekarno. Menurut kaum Republikan di Bali, proklamasi identik dengan Soekarno-Hatta, apalagi Soekarno merupakan putra Bali. Buleleng merupakan rumah biologis Soekarno, sedangkan Badung (Puri Satria) merupakan rumah ideologis Soekarno.

Menurut I Gusti Ketut Pudja tokoh republikan yang gigih mempertahankan proklamasi adalah tokoh sentral republikan kesatuan. Oleh karena itu, ia ditangkap oleh Belanda dan ditahan selama pergolakan tentang federalisme Van Mook. Setelah dibebaskan pada tanggal 13 Maret 1948, ia dipekerjakan di Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta (I Made Pageh, 2011: 105).

Ini kepercayaan para Republikan berdiri di belakang proklamasi, berdiri di belakang Soekarno-Hatta. Raja Badung, Cokorda Alit Ngurah, dengan adiknya Cokorda Ngurah, dan putra-putranya Cokorda Agung Tresna dan Cokorda Bagus Sayoga berdiri di belakang Republik, sekali pun jabatan Raja Badung dicopot dari Cokorda Alit Ngurah oleh Belanda pada tahun 1947. Para elite kerajaan lainnya di Badung, membangun kesatuan militer yaitu TKR/BKR di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Putu Wisnu, dan I Gusti Ngurah Pindha.

Para elite kerajaan yang benar-benar paham pilihan antara federalisme

dan unitarisme adalah I Gusti Ketut Pudja yang mengetahui betul bahwa federalisme mempunyai bahaya perpecahan, karena Indonesia adalah negara yang heterogen. Sistem yang paling baik dan cocok di negara Indonesia adalah Negara Kesatuan.

Dalam zaman penjajahan juga, Belanda sebenarnya mengadopsi sistem Negara Kesatuan, dan itu sudah dipahami oleh Van Mook. Menurut Pudja, memang Van Mook ingin memecah Republik menjadi negara kecil-kecil. Pada mulanya Van Mook membentuk Negara Bagian Kalimantan dan Timur Besar, tetapi kemudian Perjanjian Linggarjati dilanggar dengan membentuk Negara Bagian yang kecil-kecil seperti Jawa Timur dan Pasundan.

Elite Kerajaan Republikan Federalisme (Kooperatif)

Beberapa elite kerajaan yang sebenarnya bersimpati kepada Republik tetapi mengambil jalan lain yaitu kerja sama dengan pemerintah Belanda. Tokoh-tokoh ini tidak mudah dilacak karena sepintas mereka adalah tokoh federalisme karena mereka juga raja dan orang terdekat raja. Namun tokoh ini dapat dilacak dari sejarah perjuangan dan latar belakang orang tuanya. Tambahan pula seperti yang sudah disebutkan di atas, hanya sedikit elite kerajaan yang masih mendukung Belanda. Namun karena berbagai sebab seperti kurang komunikasi dan kurangnya pemahaman yang baik, mereka cenderung ke arah federalisme. Tokoh-tokoh tersebut seperti Anak Agung Pandji Tisna, Mr. Anak Agung Ngurah Ketut Djelantik, Anak Agung Gde Agung, I Gusti Bagus Oka, Mr. Gde Panetja, Made Mendera.

Keenam elite kerajaan ini menurut keputusan Letnan Gubernur Jenderal 14 Desember 1946, dikirim sebagai Badan Perwakilan Sementara Indonesia Timur. Menurut pemerintah Belanda, tokoh-tokoh ini diharapkan mendukung kebijakan pemerintah Belanda untuk mewujudkan federalisme. Tetapi pihak pejuang Bali dan organisasi-organisasi pemuda Republik, mengharapkan utusan ini tetap mendukung Negara Kesatuan dengan cara bekerja sama dengan Belanda.

Ternyata para elite kerajaan ini melewati cara yang harus dijalankan yang pada akhirnya nanti merupakan tujuan Negara Kesatuan dan mereka tergabung dalam fraksi progresif parlemen Negara Indonesia Timur (I Made Sendra, 2013: 102).

Jika diperhatikan, tokoh Anak Agung Pandji Tisna dan Mr. Anak Agung Ngurah Ketut Djelantik adalah putra Raja Buleleng, Anak Agung Putu Djelantik, yang menjabat sebagai raja sampai tahun 1944. Selanjutnya Raja Buleleng dijabat oleh Anak Agung Pandji Tisna sampai tahun 1947, dan digantikan oleh adiknya sampai terbentuknya Negara Kesatuan. Anak Agung Pandji Tisna memang sejak awal sudah bersimpati dengan perjuangan proklamasi dan ikut membangun bangsa Indonesia lebih maju melalui pendidikan. Hal ini karena pengaruh dari ajaran Dr. Soetomo, pendiri Budi

Utomo. Pandji Tisna juga sempat mengikuti pidato-pidato Bung Karno, tetapi karena ia merupakan anak raja, ia tidak berani secara terang-terangan mendukung Republik. Ia tidak pernah berseberangan dengan I Gusti Ketut Pudja yang merupakan tokoh sentral Negara Kesatuan yang merupakan kerabatnya.

Kesimpulan

Revolusi mempertahankan kemerdekaan yang terjadi di Bali pada periode 1945-1950 sebenarnya adalah konflik internal di antara para elite kerajaan yang ingin mempertahankan dan memperjuangkan proklamasi, dan yang menentang adanya proklamasi. Namun jika ditarik ke belakang, konflik para elite kerajaan ini memang sudah jauh lama terjadi yang disebabkan oleh adanya sistem kasta (wangsa) serta perebutan hegemoni yang akhirnya memuncak dengan terjadinya revolusi 1945. Segera setelah kedatangannya di Bali pada tanggal 3 Maret 1946, Belanda (NICA) melakukan pendekatan-pendekatan dengan beberapa elite kerajaan di Bali. Pendekatan ini utamanya bermaksud untuk mempengaruhi para elite kerajaan itu untuk mendukung kembalinya Belanda di Indonesia, khususnya di Bali. Namun hal ini menyebabkan adanya kecurigaan dari elite kerajaan Bali yang mendukung republik. Kecurigaan ini yang akhirnya memicu adanya konflik antara elite kerajaan.

Para elite kerajaan di Bali yang terlibat dalam konflik dalam revolusi dapat dikategorikan dalam tiga varian. Tiga varian ini antara lain: (1) Raja dengan kerabatnya (*the rulling class*), yang pada dasarnya menentang adanya proklamasi karena memiliki hubungan kedekatan yang sudah mengakar sejak lama dengan Belanda jauh sebelumnya. Elite ini bisa dikatakan sebagai elite kerajaan federalisme, bukan republiken; (2) Elite tandingan dari varian pertama, yaitu elite kerajaan yang mendukung adanya proklamasi serta yang berusaha melawan hegemoni elite pertama. Elite tandingan ini sering dikatakan sebagai non-kooperatif atau juga elite kerajaan republiken-kesatuan. Elite yang dimaksud antara lain seperti, I Gusti Ketut Pudja, I Gusti Putu Merta, Cokorda Alit Ngurah, maupun I Gusti Ngurah Rai; dan (3) Elite kerajaan republiken-federalisme, yang mau bekerja sama (kooperatif) dengan Belanda, namun pada akhirnya mendukung republik, bahkan juga berusaha untuk melawan hegemoni elite varian pertama. Elite yang dimaksud antara lain seperti, Anak Agung Gde Agung, Anak Agung Pandji Tisna, serta adiknya Mr. Anak Agung Ngurah Ketut Djelantik. Oleh karena pendidikan tinggi yang dimiliki, ketiga tokoh ini akhirnya sangat berperan aktif membawa RIS menuju NKRI.

Masyarakat Bali sebenarnya masih dalam kategori masyarakat feodal karena masih dipengaruhi sistem kasta. Masyarakat Bali yang berstruktur ketat dan rumit serta tertutup. Dalam sistem seperti ini masyarakat Bali tidak dimungkinkan terjadinya mobilitas vertikal. Maka dari itu sistem kasta

ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengikat kesetiaan masyarakat Bali dengan menciptakan hubungan patron-klien yang baru. Belanda dalam hal ini mengganti patron-klien yang lama (kawulo-gusti) yang berdasarkan upeti, digantikan dengan patronasi baru ikatan pajak-tanah yang mereka bangun pada pemerintahan yang baru.

Oleh karena itu dikenalkan sistem pemerintahan yang federalis yang selalu ingin dalam ikatan dengan Belanda. Sistem kasta juga direvitalisasi sejak tahun 1938 dan Puri-puri (Keraton) dibangun dengan megah sebagai jaring-jaring budaya untuk mengikat masyarakat Bali ini.

Pihak elite kerajaan republikan-kesatuan dengan tokoh utamanya I Gusti Ketut Pudja, I Gusti Putu Merta, Cokorda Alit Ngurah, maupun I Gusti Ngurah Rai tetap berjuang dengan gigih untuk menentang federalisme dan mempertahankan Negara Kesatuan yang Unitaris. Menurut I Gusti Ketut Pudja, pembagian struktur sosial lama (sistem kasta) tidak sepenuhnya dapat dijadikan pegangan dan terlalu menyederhanakan kenyataan historis dan sosial-budaya masyarakat Bali. Menurutnya juga sistem kasta ini anti demokrasi karena penguasa dalam bentuk apapun tetap membebani rakyat, baik kerajaan maupun Belanda itu sendiri. Dengan demikian, pembentukan negara baru yang demokratis dan juga sistem Negara Kesatuan juga sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945 adalah pilihan yang diperjuangkan oleh kelompok republikan-kesatuan yang akhirnya juga disetujui oleh elite kerajaan republikan-federalisme, Anak Agung Gde Agung dan yang lainnya.

Namun yang menjadi menarik adalah di Bali tidak terjadi revolusi sosial seperti di beberapa tempat lainnya di Indonesia. Oleh karena elite kerajaan (ketiga varian di atas), mereka saling berkerabat karena adanya ikatan kasta serta ikatan hubungan patron-klien yang sangat kental. Puri-puri (Keraton) di Bali, tidak ada yang “diganggu” oleh perjuangan bersenjata. Sampai sekarang pun, keturunan raja-raja (patron) yang mendiami Puri masih dihormati oleh masyarakatnya (klien). Kedudukan Puri tetap sebagai puncak piramida sosial, meskipun tidak lagi berkuasa secara formal tetapi tetap dihormati. Alasan lain mengapa di Bali tidak terjadi revolusi sosial karena di Bali tidak ada kelompok Marxis yang kuat, tidak seperti di daerah lain di Indonesia.

Referensi

Buku

- Eisenstaad (1986). *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Gorda, I Gusti Ngurah (2005). *Biografi Anak Agung Pandji Tisna: Raja Buleleng, Budayawan, Pendidik, dan Pelopor Pariwisata*. Denpasar: Asta Brata.
- Herzfeld, Michael (2002). *The Absent Presence: Discourses of Crypto-Colonialism*. Duke University Press.
- Howe, Leo (2001). *Hinduism and Hierarchy in Bali*. Oxford: James Curry.
- I Gusti Ngurah Bagus (1995). “Manusia dan Kebudayaan di Indonesia.” Dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta:

- Djambatan.
- I Made Pageh (2011). *Kepahlawanan dan Perjuangan Sejarah Sekitar Proklamasi Kemerdekaan NKRI: Konteks Lempah Mr. I Gusti Ketut Pudja, 1908-2010*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Keller, Suzanne (1984). *Penguasa dan Kelompok Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: CV Rajawali.
- Ketut Wiana (2007). *Tri Hita Karana: Menurut Konsep Hindu*. Surabaya: PARAMITA.
- Kuntowijoyo (2003). *Metodologi Sejarah edisi kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo (2004). *Raja, Priyayi, dan Kawula: Surakarta, 1900-1915*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo (2017). *Petani, Priyayi, dan Mitos Politik*. Yogyakarta: Labirin.
- Legg, Keit R. (1983). *Tuan, Hamba, dan Polity (terj.)*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Munandar, Agus Aris (2005). *Istana Dewa Pulau Dewata: Makna Puri Bali Abad Ke-14 – 19*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Niel, Robert van (1960). *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. Sgravenhage: W van Hoeve.
- Nordholt, Henk Schulte (2006). *The Spell of Power: Sejarah Politik Bali 1650-1940*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Pareto, Vilfredo (1968). *The Rise and The Fall of The Elites: An Application of Theoretical Sociology*. New Jersey: The Bed Minstek Press Incorporation.
- Sutherland, Heather (1983). *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Sutrisno, Mudji & Hendar Putranto (ed.) (2005). *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Sejarah Yayasan Kerta Budaya (2011). *Perjalanan Arya Damar dan Arya Kenceng di Bali*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Wirawan, Anak Agung Bagus (2012). *Pusaran Revolusi Indonesia di Sunda Kecil 1945-1950*. Denpasar: Udayana University Press.

Jurnal dan Surat Kabar

- Anon (2022). "Pasametonan Warga Ageng Lanang Cepaka Pemecutan Gelar Donor Darah." *Harian Nusa Bali*, 11 Juli 2022.
- Ginarsa, Ketut (1955). "Sedjarah Buleleng." *Bahasa dan Budaya* 6, Tahun III. Jakarta: Balai Pustaka.
- I Gusti Ngurah Bagus (1987). "Masalah Demokrasi, Kekuasaan, dan Konflik Sosial: Kajian Pendahuluan Tentang Pemuda Pejuang Dalam Tahun Lima Puluhan di Bali." *Widya Pustaka* 3. Denpasar: Fakultas Sastra UNUD.
- Mrazek, Rudolf (2004). "Bypasses and Flyovers: Approaching the Metropolitan History of Indonesia." *Social History* 29, 4. Taylor & Francis.
- Sendra, I Made (2013). "Pergolakan Elite dalam Panggung Politik di Bali 1945-1950." *Jurnal Kajian Bali* 3, 1. Denpasar: Jurnal Kajian Bali.
- Suwignyo, Agus (2013). "The Great Depression and the Changing Trajectory of Public Education Policy in Indonesia, 1930-42." *Journal of Southeast Asian Studies* 44, 3. Cambridge University Press.